



JEMBATAN - Jembatan bambu yang selama ini dimanfaatkan warga untuk menyeberangi sungai.

Bali Post/ina

## 2016, Pemkab Rencanakan Bangun Jembatan di Subaya

### Bangli (Bali Post) -

Adanya harapan warga Desa Subaya, Kintamani untuk memiliki jembatan permanen yang menghubungkan wilayah setempat dengan Tejakula Buleleng mendapat tanggapan Pemkab. Melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU), Pemkab akan mengusahakan pembangunan jembatan pada tahun depan. Guna mempermudah akses jalan warga setempat, dalam perubahan tahun ini untuk sementara waktu baru bisa dilakukan pengerasan jalan menuju Bukit Mandeha sepanjang 1 kilometer.

Kepala Dinas PU Ida Bagus Wediatmika, Jumat (4/9) mengatakan, adanya usulan masyarakat terkait pembangunan jembatan tersebut sebenarnya sudah masuk ke Dinas PU beberapa waktu lalu. Hanya saja pihaknya belum bisa merealisasikan usulan tersebut. "Usulannya sudah ada, tetapi belum bisa dilaksanakan sekarang," ujarnya.

Diakui, sejauh ini pihaknya memang belum menganggarkan pembuatan jembatan tersebut. Dalam APBD Perubahan tahun ini pihaknya baru menganggarkan pembentukan dan pengerasan jalan menuju lokasi tersebut. "Dalam anggaran perubahan sekarang

kami belum bisa lakukan pembangunannya. Karena waktunya mepet. Tahun 2016 akan kami perjuangkan," terangnya.

Kabid Bina Marga Dinas PU Bangli Wida Gunawan menambahkan sebelum dilakukan pembangunan pihaknya akan melakukan survei kembali terhadap lokasi jembatan. "Kami akan survei kembali. Kalau sudah jelas baru merancang fisiknya. Paling tidak 2016 atau 2017 pembangunannya," jelasnya. Untuk sementara waktu dalam anggaran perubahan tahun ini pihaknya hanya bisa melakukan pengerasan jalan menuju Bukit Mandeha sepanjang 1 kilometer. Adapun besaran anggaran pengerasan yang telah disiapkan Rp 200 juta.

Wida Gunawan mengatakan, jalan yang kini dilalui warga menuju Tejakula berupa jalan setapak. Panjangnya sekitar tujuh kilometer tembus di sebelah Kantor Camat Tejakula. Dibanding ke pusat desa, warga Subaya diakuinya memang lebih dekat ke Tejakula. Hanya saja untuk menuju Tejakula harus melewati sungai dengan aliran deras. Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya puluhan warga Desa Subaya, Kintamani selama ini mengharapkan adanya perhatian

pemerintah untuk membangun jembatan permanen penghubung Subaya dengan Tejakula Buleleng.

Jembatan tersebut diharapkan untuk membuka isolasi warga. Klian Subak Yeh Tangga, Ketut Nusari saat ditemui di desanya belum lama ini mengatakan, wilayah Subaya bagian bawah berada di tengah hutan dan jauh dari pusat desa. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, warga lebih dekat mencarinya ke wilayah Tejakula. Namun sayangnya untuk menuju wilayah tersebut warga harus melewati sungai dengan aliran air yang cukup deras.

Untuk melintasi deras arus sungai tersebut warga hanya menggunakan jembatan bambu yang kondisinya sudah mulai rusak. "Sebenarnya jembatan bambu yang ada selama ini cukup berbahaya. Apalagi kalau musim hujan, arus sungainya sangat deras. Tak jarang jembatannya hanyut dibawa arus sungai," jelasnya. Untuk itulah pihaknya sangat mengharapkan adanya perhatian Pemkab agar bisa membuat jembatan di wilayah tersebut. Dia mengungkapkan untuk membuat jembatan, warga telah membeli badan jalan secara swadaya. (kmb40)

Edisi : Sabtu, 5 September 2015

Hal : 8





Proyek Akses Dermaga Gunaksa

# Wewenang Balai Wilayah Sungai

Semarapura (Bali Post) -

Proyek senilai Rp 40 miliar untuk pembuatan akses Dermaga Gunaksa belum juga jelas. Meski Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta telah menandatangani surat pernyataan, belum terlihat Balai Wilayah Sungai Bali Penida memulai pengerjaannya. Padahal, Pemkab Klungkung merencanakan mulai mengoperasikan Dermaga Gunaksa pada 2016. Bila tidak kunjung dikerjakan, akses Dermaga Gunaksa kemungkinan besar tidak bisa diselesaikan tahun ini.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Klungkung I Nengah Sukasta mengungkapkan, pengerjaan proyek akses dermaga menjadi wewenang Balai Wilayah Sungai. Terkait jadwal dimulainya pengerjaan, pihaknya tidak tahu secara pasti, namun diharapkan secepatnya. "Proyek sudah akan dikerjakan, namun kini tergantung pelaksanaannya," ujarnya dihubungi, Jumat (4/9) kemarin.

juga dapat menjawab keraguan pemenang tender dalam menggarap proyek.

Dalam surat tersebut dijelaskan kepemilikan lahan yang nantinya dibangun akses menuju Dermaga Gunaksa. Status eks galian C yang menjadi akses jalan telah dipastikan dimiliki Pemkab Klungkung meski kasus pengadaan lahan masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar. Selain itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung telah

Ditambahkannya, saat ini proses pengerjaan proyek sedang dalam tender dan menunggu pemenangnya. Bila semua proses dapat diselesaikan, dipastikan pengerjaan proyek segera dimulai. Sebelumnya, Bupati Klungkung menandatangani surat pernyataan terkait hak milik lahan yang akan dibuat akses menuju dermaga. Selain sebagai persyaratan yang diminta untuk pengerjaan proyek, surat pernyataan dari orang nomor satu di Klungkung ini



SULIT - Akses jalan menuju Dermaga Gunaksa sulit dilalui akibat tidak kunjung diperbaiki.

Bali Post/dwa

Edisi : Sabtu, 5 September 2015

Hal : 10





Sembungan - -

memberikan *legal opinion* pada April lalu.

Di sisi lain, dengan waktu tersisa hanya empat bulan, dipastikan anggaran Rp 40 miliar dari pusat tidak bisa terserap seluruhnya. Menurut rencana, pengerjaan akses masuk akan dilakukan dengan sistem uruk dan jembatan. Dibutuhkan empat jembatan untuk dapat menembus Dermaga Gunaksa dengan panjang 515 meter dari panjang jalan keseluruhan 1,755 km.

#### Kolam

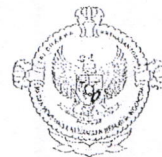
Sementara itu, dari pantauan di lapangan, dua alat berat beroperasi melakukan pengerukan pasir di tepi pantai untuk membuat kolam dermaga. Pasir-pasir yang dikeruk kemudian dibawa ke

atas truk untuk dikumpulkan di lokasi sekitar dermaga.

Tidak hanya alat berat, petugas BPN dan Dishub Klungkung juga sempat turun ke lokasi dermaga belum lama ini. Mereka datang untuk melakukan pengukuran akses jalan dermaga. Terkait dengan pembangunan kantor untuk dermaga, Sukasta mengakui belum bisa diwujudkan tahun ini. Hal ini karena masih ada pengerukan kolam pelabuhan.

Pembangunan kantor dermaga rencananya dianggarkan pada 2016, tetapi dinilainya baru sebatas rencana. "Kalau dikerjakan sekarang takutnya bangunannya hancur, karena saat ini masih tahap pengerukan kolam dermaga," ujarnya. (dwa/kmb)





## Sebelum Revisi Blok Tahura Tuntas

# Proyek "Long Storage" Tak Bisa Dilanjutkan

Denpasar (Bali Post) -

Dinas Kehutanan Bali tetap kukuh pada keputusannya untuk menghentikan proyek *long storage* Pemkab Badung di muara Tukad Mati. Proyek Pemkab Badung ini baru bisa dilanjutkan setelah proses revisi blok perlindungan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai tuntas dilakukan.

Kepala Dinas Kehutanan Bali IGN Wiranatha dalam jumpa pers, Jumat (4/9) kemarin, menegaskan keputusan untuk merevisi blok perlindungan dalam rencana pengelolaan Tahura tidak lepas dari hasil rapat di Jakarta. Rapat ini digelar setelah Bupati Badung menyuarakan Kementerian Kehutanan pascadilaporkan

ke polisi oleh Dishut Bali.

Hasil pertemuan di Jakarta normatif saja, artinya maksud Pemkab Badung perlu didukung, sejak awal pun saya dukung karena bagus.

Hal. 19

Blok Perlindungan

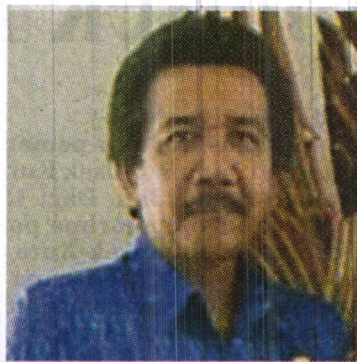
"...kemudian muncul Surat Dirjen Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tertanggal 29 Juni 2015 terkait normalisasi Tukad Mati. Lantaran ada kalimat multitafsir, surat itu belum bisa dijadikan pegangan hukum untuk melanjutkan proyek sebelum blok perlindungan tuntas direvisi."

IGN Wiranatha

Kadishut Bali



BEBAS SAMPAH - Pemkab Badung membebaskan muara Tukad Mati dari sampah sebelum pengerjaan proyek normalisasi muara yang berada di zona perlindungan Tahura



Edisi : Sabtu, 5 September 2015

Hal : 1





Sambungan - -

## Blok Perlindungan

### Dari Hal. 1

"Namun lokasi pembangunan di blok perlindungan sehingga secara ketentuan harus dilakukan perubahan, revisi bila pembangunan akan diteruskan. Setelah dilakukan revisi blok, agar dilakukan kolaborasi untuk kerja sama antara Dishut Bali dengan Pemkab Badung," jelasnya.

Setelah itu, lanjut Wiranatha, kemudian muncul Surat Dirjen Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KS-DAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tertanggal 29 Juni 2015 terkait normalisasi Tukad Mati. Lantaran ada kalimat multitafsir, surat itu belum bisa dijadikan pegangan hukum untuk melanjutkan proyek sebelum blok perlindungan tuntas direvisi. Dengan kata lain sampai ada

pengesahan dari Kementerian Kehutanan terkait revisi blok perlindungan dalam rencana pengelolaan Tahura Ngurah Rai. "Sebelum direvisi, berat kami," tandasnya menekankan.

Ia juga menjelaskan, Tahura Ngurah Rai mempunyai perencanaan yang dievaluasi tiap lima tahun. Evaluasi terakhir dilakukan 2012. Berarti secara normatif akan diadakan 2017. Pada saat penyusunan rencana pengelolaan (2012 - red) yang di dalamnya ada blok, blok pemanfaatan, blok Pudut, blok perlindungan, dsb. itu diadakan konsultasi publik sekitar bulan Mei 2013, sebelum rencana pengelolaan disahkan oleh Dirjen Kementerian Kehutanan. Dalam konsultasi publik bertujuan menyerap masukan, mau apa masyarakat, mau apa pemerintah dalam hal ini

Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang berdampingan langsung dengan Tahura Ngurah Rai.

Dikatakan, Pemkab Badung saat itu diwakili utusan Bappeda Badung dan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan. Saat itu, utusan Pemkab Badung tidak ada yang menyampaikan rencana pembangunan *long storage* di Tukad Mati. "Kalau saja saat itu dimunculkan, tentunya kita akomodir. Tidak repot seperti sekarang. Kita sudah berusaha mengakomodasikan dalam konsultasi publik itu namun tidak muncul perencanaan tersebut," jelasnya.

Wiranatha menambahkan, Pemkab Badung baru menyampaikan rencana proyek penanggulangan banjir di wilayah Kuta dan sekitarnya itu setelah perencanaan Tahura disahkan Menteri Ke-

hutanan. Tepatnya awal tahun 2014, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung datang ke Dinas Kehutanan Bali membicarakan hal itu.

"Saat itu kita sudah sarankan karena blok perlindungan harus menempuh proses bla...bla...bla...bla... Namun dia menyurati Gubernur, secara normatif kita jawab dengan surat Sekda Bali bahwa itu hanya bisa dipakai untuk kegiatan terbatas Kehutanan, berarti kegiatan lain tidak. Prinsipnya waktu itu.

Namun istilah Bali-nya *bengkung* begitu, jalan terus. "Kita kasih peringatan berkali-kali. Karena saya sebagai penjaga gawang di wilayah itu, sehingga setiap apa pun yang tidak sesuai ketentuan ya... tentunya kita beri peringatan. Karena sudah tidak mempan ya... kami lapor ke polisi," paparnya. (kmb32)

Edisi : Sabtu, 5 September 2015

Hal : 19





Bali Post



## Soal Surat Dirjen KSDAE

# Bali dan Badung Beda Pendapat

Mangupura (Bali Post) -

Polemik proyek normalisasi muara Tukad Mati akan terus bergulir. Sebab, surat Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dipersiapkan berbeda oleh Dinas Kehutanan (Dishut) Bali dan

Pemkab Badung. Kepala Dinas Kehutanan Bali IGN Wiranatha menyatakan surat Dirjen KSDAE terkait normalisasi Tukad Mati tidak bisa dijadikan alasan proyek tersebut bisa berlanjut.

Hal. 19

Kalimat Multitafsir

"Pada poin kedua dalam surat (KSDAE) tersebut dengan jelas menyebutkan, pembangunan *long storage* dipandang perlu dan strategis dalam penanganan sampah, pencegahan banjir, dan pengelolaan Tahura, sehingga perlu mendapat dukungan dari Kementerian LHK dan Pengelola Tahura Ngurah Rai c.q. Dinas Kehutanan Provinsi Bali dan UPTD Tahura Ngurah Rai, karena penanganan sampah dan banjir dapat dikategorikan sebagai bagian dari kegiatan penanggulangan dalam rangka meningkatkan fungsi Tahura."

A.A. Gede Raka Yuda

Kabag Humas dan Protokol Badung



Edisi : Sabtu, 5 September 2015

Hal : 1





Sambungan - -

## Kalimat Multitafsir

### Dari Hal. 1

Lantaran ada kalimat multitafsir, sehingga surat itu belum bisa dijadikan pegangan hukum untuk melanjutkan proyek sebelum blok perlindungan tuntas direvisi. Dengan kata lain sampai ada pengesahan dari Kementerian Kehutanan terkait revisi blok perlindungan dalam rencana pengelolaan Tahura Ngurah Rai.

Sementara Panjabat Bupati Badung Nyoman Harry Yudha Saka melalui Kabag Humas dan Protokol A.A. Gede Raka Yuda menilai surat tersebut bisa dijadikan rujukan bahwa proyek tersebut didukung oleh pemerintah pusat.

Dalam surat Dirjen itu sudah jelas arahnya meminta program tersebut ditindaklanjuti untuk kepentingan strategis nasional. Pada poin

kedua dalam surat tersebut dengan jelas menyebutkan, pembangunan *long storage* dipandang perlu dan strategis dalam penanganan sampah, pencegahan banjir, dan pengelolaan Tahura, sehingga perlu mendapat dukungan dari Kementerian LHK dan Pengelola Tahura Ngurah Rai c.q Dinas Kehutanan Provinsi Bali dan UPTD Tahura Ngurah Rai, karena penanganan sampah dan banjir dapat dikategorikan sebagai bagian dari kegiatan penanggulangan dalam rangka meningkatkan fungsi Tahura.

Pada poin ketiga juga disebutkan, Pemerintah Kabupaten Badung telah melaksanakan normalisasi muara Tukad Mati sebagai kegiatan rutin penanganan sampah dan pengendalian banjir di kawasan pariwisata Kuta, Legian, dan Seminyak. Oleh

karena itu, kegiatan normalisasi dan pembangunan *long storage* di muara Tukad Mati perlu mendapat dukungan berkenaan dengan alokasi anggarannya telah tersedia melalui APBD 2015.

Poin keempat menegaskan, mengingat rencana lokasi pembangunan di blok perlindungan, maka Dinas Kehutanan Provinsi Bali c.q UPTD Tahura Ngurah Rai agar segera menindaklanjuti dengan melakukan *review* penetapan blok Tahura sekitar muara Tukad Mati dan mengusulkan perubahannya kepada Direktorat Jenderal KSDAE untuk penetapannya.

Kelima, berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sambil menunggu proses *review* blok pengelolaan Tahura, menurut pendapat kami, kelangsungan operasionalisasi

pembangunan *long storage* untuk selanjutnya dapat dilakukan melalui mekanisme kerja sama antara Dinas Kehutanan Provinsi Bali c.q UPTD Tahura Ngurah Rai dengan Pemerintah Kabupaten Badung.

Berdasarkan arahan dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Pemkab Badung melalui Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Badung telah melakukan koordinasi langsung dengan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Taman Hutan Raya (Tahura) serta Dinas Kehutanan Provinsi Bali. "Proyek penanggulangan banjir itu juga untuk menjaga hutan bakau yang ada di sekitarnya dari sampah plastik, karena akan dijangkit di hulu sungai," imbuhnya. (kmb27)

Edisi : Sabtu, 5 September 2015

Hal : 19